

# **TESIS**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
DIMODERASI OLEH SISTEM INFORMASI AKUNTASI  
PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN  
(STUDI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN)**

**LA ODE FIRMAN HAMZA  
A0422220066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **TESIS**

## **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH SISTEM INFORMASI AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (STUDI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN)**

Disusun dan diajukan oleh

**LA ODE FIRMAN HAMZA  
A0422220066**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH SISTEM INFORMASI AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (STUDI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh

**LA ODE FIRMAN HAMZA**  
**A042222006**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 02 Mei 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



**Dr. Sabir, SE., M.Si**  
**NIP. 19740715 2002121003**



**Andi Aswan, SE., MBA., M.Phil., DBA**  
**NIP. 197705102006041000**

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin



**Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si**  
**NIP. 197209212006042001**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**  
**NIP. 196402051988101001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LA ODE FIRMAN HAMZA

NIM : A042222006

Jurusan/program studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH SISTEM AKUNTASI PEMERINTAH  
DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
(STUDI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**LAODE FIRMAN HAMZA**

## PRAKATA

*Bismillahirra manirrahiim*

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “ **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMODERASI OLEH SISTEM INFORMASI AKUNTASI PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (STUDI PADA KABUPATEN BUTON SELATAN** “ sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister (S2) pada Megister Manajemen Keuangan Daerah di Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun laporan ini, banyak masukan dan dukungan yang penulis dapatkan. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada kedua orang tua, istri dan anak-anak tercinta senantiasa mendoakan dan selalu mendukung baik dari segi moril maupun materil guna menunjang kebutuhan dan pendidikan penulis. Terimakasih atas kasih

Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada beberapa pihak yang telah membantu dan memberikan arahan mulai dari awal penyusunan hingga tesis ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr Abdul Rahman Kadir, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M. Si, selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini
4. Dr. Sabir, SE., M.Si. dan Dr. Andi Aswan, SE.,MBA.,M.Phil.,CWM selaku pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya

mengoreksi dan memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat guna penyusunan tesis

5. Segenap dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajar, membimbing dan mendidik penulis sejak awal kuliah hingga selesai. Juga segenap staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama kuliah, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya.

semua orang-orang yang terlibat dalam pembuatan tesis ini.. semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari tesis ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya.

Sekian dan terima kasih

## ABSTRAK

LA ODE FIRMAN HAMZA. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimoderasi oleh Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern: Studi pada Kabupaten Buton Selatan* (dibimbing oleh Sabir dan Andi Aswan).

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa jauh pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh sistem informasi akuntansi pemerintah dan pengendalian intern di Kabupaten Buton Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung dengan menggunakan seratus sampel. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi sederhana dan uji analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian dengan analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Hasil analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pemerintah memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memperlemah hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi pemerintah, pengendalian intern, kualitas laporan keuangan



## ABSTRACT

LA ODE FIRMAN HAMZA. *The Effect of Competence of Human Resources on the Quality of Financial Reports Moderated by the Accounting Information System of Local Government and Internal Control System: A Study in South Buton Regency* (supervised by Sabir and Andi Aswan)

This study aims to analyze to what extent of the effect of competence of human resources and the quality of financial reports moderated by the accounting information system of local government and internal control system of South Buton Regency. This study used primary data collected using direct questionnaire consisting of 100 samples. Data analysis used simple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of simple regression analysis show that the competence of human resources positively and significantly affect the quality of financial reports of the local government of South Buton Regency. The results of Moderated Regression Analysis (MRA) indicate that the government accounting information system strengthens the relationship between the competence of human resources and the quality of financial reports of the local government of South Buton Regency. However, the research results indicate that the internal control system weakens the relationship between the competence of human resources and the quality of financial reports of the local government of South Buton Regency.

Keywords: human resource competence, government accounting information system, internal control, financial report quality



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>IV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	11
2.1.1 Stewardship Theory.....	11
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ....	17
2.1.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	22
2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	23
2.1.2.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan .....	24
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	28
2.1.3.1 Karakteristik Kompetensi SDM.....	32
2.1.3.2 Indikator Kompetensi Aparatur Negara .....	33
2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi .....	34
2.1.4.1 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah .....	36
2.1.4.2 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Daerah.....	37
2.1.4.3 Indikator Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah .....	39
2.1.5 Sistem Pengendalian Intern .....	40
2.1.5.1 Unsur Pengendalian Intern Pemerintah.....	41
2.2 Tinjauan Empiris.....	43
<b>BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>51</b>
3.1 Kerangka Konseptual.....	51
3.2 Hipotesis Penelitian .....	55

<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	56
4.2 Lokasi Penelitian .....	57
4.3 Populasi dan Sampel.....	57
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	59
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	59
4.6 Teknik Analisis Data .....	61
4.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	68
4.8 Instrumen Penelitian.....	71
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	72
5.2 Karakteristik Responden.....	77
5.3 Uji Instrument Penelitian.....	79
5.4 Uji Asumsi Klasik .....	84
5.5 Uji Analisis Regresi.....	87
5.6 Uji Moderasi (Moderated Regression Analysis) .....	89
5.7 Pembahasan .....	91
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Opini Audit BPK Perwakilan Kabupaten Buton Selatan 2019 – 2022 .....	5
2.1	Penelitian Terdahulu .....	43
4.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 Kabupaten Buton Selatan .....	58
4.2	Definisi Operasional Variabel .....	69
5.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	77
5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	78
5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .....	78
5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
5.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	79
5.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi sumber daya manusia (X1)	81
5.7	Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (Z1).....	81
5.8	Hasil Uji Validitas Pengendalian Intern(Z2) .....	82
5.9	Hasil Uji Validitas Kualitas Lapora Keuangan(Y) .....	82
5.10	Hasil Uji Reliabilitas.....	83
5.11	Hasil Uji Multikolinearitas .....	85
5.12	Hasil Uji koefisien determinasi.....	87
5.13	Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana .....	88
5.14	Hasil Uji Uji Moderasi (Moderated Regression Analysis).....	90

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Kerangka Konseptual.....	54
5.1	Peta Kabupaten Buton Selatan .....	73
5.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.....	76
5.3	Hasil Uji normal probability plot .....	84
5.4	Hasil Uji Heterokedaksitas .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik adalah entitas yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang dan layanan publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dalam konteks ilmu ekonomi, sektor publik dapat diartikan sebagai entitas yang berusaha menghasilkan barang dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Organisasi sektor publik sering dikaitkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang sebagian besar kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama, dan hal-hal lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sebagai penyedia layanan publik, organisasi sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan hak-hak mereka dihormati. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dengan efisien dan transparan, serta memastikan akses yang adil dan merata bagi semua warga negara. Selain itu, organisasi sektor publik juga berperan dalam merumuskan kebijakan publik, mengawasi kegiatan sektor swasta, melindungi kepentingan publik, dan menjaga stabilitas sosial serta keadilan. Melalui upaya kolaboratif dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, organisasi sektor publik dapat

mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Organisasi sektor publik di Indonesia saat ini ditandai dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap organisasi-organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena alasan berikut: (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber daya yang signifikan; (b) penggunaan sumber daya tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber daya tersebut (Partono, 2000).

Perkembangan akuntansi di sektor publik menuntut pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan yang memenuhi prinsip - prinsip Transparansi dan akuntabilitas, konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mematuhi prinsip-prinsip waktu yang tepat dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Komponen laporan keuangan yang disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kinerja pemerintah daerah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Opini WTP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah bersangkutan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara yang perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan gambaran akuntabilitas penggunaan dana yang berasal dari anggaran negara, dengan semakin baik dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, maka BPK akan memberikan suatu opini terhadap laporan keuangan yang diperiksa (Firmanzah, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tugas BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau

opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan cerminan bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD (Heriningsih, 2014). Didapatkannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap suatu entitas pemerintah daerah diharapkan mampu memiliki kinerja keuangan, dilihat dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada entitas pemerintah daerah yang belum menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga juga memerlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

Kabupaten Buton Selatan atau biasa disingkat Busel merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014. Alasan pemekaran kabupaten Buton Selatan adalah karena akses yang menghambat pelayanan. Sebagai salah satu daerah yang baru dimekarkan, Kabupaten Buton Selatan belum memiliki permasalahan yang relatif kompleks, dengan demikian akan mudah diarahkan sehingga pencapaian untuk laporan keuangan Pemda yang beropinion WTP menjadi suatu keniscayaan.

Meskipun Kabupaten Buton Selatan belum memiliki permasalahan yang kompleks, tetap penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.

Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, Kabupaten Buton Selatan dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memenuhi prinsip-prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu opini audit BPK 2019-2021.

**Tabel 1. 1** Opini Audit BPK Perwakilan Kabupaten Buton Selatan 2019 – 2022

No	Opini BPK	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	-	-	-	√	√	√	-	√
2	Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penjelas (WTP-DPP)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	√	√	√	-	-	-	√	-
4	Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPK.go.id

Dalam opini audit, pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan telah berhasil memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah diakui memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pencapaian opini WTP secara berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi, karena menunjukkan bahwa Kabupaten Buton Selatan telah mengelola keuangan publik dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Opini WTP memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Namun, penting untuk diingat bahwa memperoleh opini WTP tidak berarti bahwa tugas transparansi dan akuntabilitas telah selesai. Pemerintah daerah

Kabupaten Buton Selatan perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem keuangan mereka agar tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Langkah-langkah seperti penerapan tata kelola keuangan yang baik, pemisahan kekuasaan, pengawasan internal yang efektif, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Untuk menjaga kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, diperlukan analisis mengenai kualitas keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu cara untuk menganalisisnya adalah dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP). Implementasi SIAP penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. SIAP adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses akuntansi pemerintah untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara akurat dan tepat waktu. SIAP memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengelola informasi keuangan dengan lebih efisien, meningkatkan pengendalian intern, serta memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan secara lebih baik.

Selain mengimplementasikan sistem informasi akuntansi pemerintahan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan, penting juga untuk menginvestasikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan keuangan publik.

Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil dalam pengelolaan keuangan akan menjadi aset berharga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dapat memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional. Hal ini dapat melibatkan pelatihan dalam bidang akuntansi publik, pengelolaan anggaran,

pelaporan keuangan, pengendalian intern, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan publik.

Dengan meningkatkan kapasitas SDM terkait keuangan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan akan memiliki tim yang mampu mengelola keuangan dengan profesionalisme, mengikuti perubahan peraturan dan kebijakan terkait, serta menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan publik. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi pilar penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah efektivitas pengendalian internal. Pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal didasarkan pada kriteria yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meneliti kewajaran suatu informasi. Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang belum berfungsi secara efektif (BPK, IHPS 1 Tahun 2018). Oleh karena itu, auditor internal seharusnya melakukan review secara terus-menerus sejak proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan, untuk mendeteksi lebih awal adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014)

mengenai pengaruh sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain oleh Sukmaningtyas (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada DPPKAD Kabupaten Boyolali. Temuan- temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheta (2017), Nurillah (2014), Sudiarianti (2015), dan Sukmaningrum (2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan judul “Pengaruh sistem informasi akuntansi pemerintah, Penerapan standar akuntansi pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderator terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini dilakukan pada Kabupaten Buton Selatan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai moderasi dalam hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?

3. Apakah Pengendalian Intern memiliki peran moderasi dalam hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk menganalisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah dalam memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Untuk menganalisis peran Pengendalian Intern dalam memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian Penelitian**

Kegunaan dan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori ilmu manajemen kontemporer dalam hal Pengaruh sistem informasi akuntansi pemerintah, Penerapan standar akuntansi pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderator terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini dilakukan pada Kabupaten Buton Selatan serta memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada bangunan teoretik yang secara keseluruhan belum diuji secara empirik.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan kapabilitas terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, termasuk konteks dan masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan masalah akan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, kegunaan penelitian akan dijabarkan untuk menjelaskan manfaatnya secara praktis atau teoritis. Terakhir, bab ini akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian, yaitu bagaimana struktur keseluruhan penelitian akan disusun.

#### **Bab II :Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan tinjauan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pada bagian ini, akan disajikan literatur terkait yang membahas topik penelitian secara mendalam. Selain itu, tinjauan empiris akan menguraikan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

#### **Bab III: Kerangka Konseptual dan Hipotesis**

Bab ini akan menyajikan kerangka konseptual yang menjadi landasan teoritis penelitian. Konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian akan dijelaskan secara rinci, dan hubungan antara

konsep-konsep tersebut akan diperlihatkan. Selain itu, bab ini akan menyajikan hipotesis penelitian, yaitu pernyataan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini didasarkan pada kerangka konseptual dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### Bab IV: Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Rincian tentang lokasi dan waktu penelitian akan dijelaskan, serta populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Metode pengambilan sampel akan dijelaskan dengan detail, termasuk teknik yang digunakan. Jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan juga akan dijabarkan, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian yang akan digunakan, dan teknik analisis data yang akan diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.

Bab V: Bab ini menguraikan tentang deskripsi sistematis data dan temuan yang diperoleh. Deskripsi penelitian ini disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI: Bab ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 *Stewardship Theory*

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari *agency theory*, yaitu *stewardship theory*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), *stewardship theory* menggambarkan bahwa manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih fokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* juga menjelaskan situasi di mana para manajer tidak terdorong oleh tujuan individu, tetapi bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi kepentingan organisasi. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi dan sosiologi yang menyatakan bahwa eksekutif bertindak sebagai "*steward*" untuk mencapai tujuan organisasi mereka (Sanjaya, 2017).

Teori *Stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas, dan jujur terhadap pihak lain. Kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas para "*principals*" (pihak yang memberikan mandat) dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya (Haliah, 2012), Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penerapan *good governance*. Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci mengenai data akuntansi dan informasi lain yang relevan. LKPD yang

disusun oleh pemerintah daerah memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Dalam perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dan *principal*. Akuntansi berfungsi sebagai alat penggerak dan mengikuti perubahan yang semakin kompleks, termasuk spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangan dalam organisasi sektor publik. Sebagai prinsipnya, akuntansi adalah alat pengendalian diri dan sarana pelaporan aktivitas manajemen terkait pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Selain itu, akuntansi organisasi sektor publik juga memiliki peran dalam mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Melalui sistem Informasi akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan transparan, sehingga memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Implementasi akuntansi dalam organisasi sektor publik juga melibatkan penggunaan standar akuntansi yang relevan, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penggunaan standar ini memungkinkan konsistensi dan keseragaman dalam pelaporan keuangan, sehingga memudahkan perbandingan kinerja antarunit kerja dan juga dengan organisasi sejenis. Selain itu, akuntansi organisasi sektor publik juga dapat membantu dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, pemerintah daerah dapat mengontrol penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, serta memberikan pertanggungjawaban yang akurat terhadap penggunaan dana publik kepada para stakeholders, termasuk masyarakat umum. Dalam konteks penelitian ini, penerapan teori *stewardship* dalam akuntansi organisasi sektor publik menjadi penting untuk memahami motivasi para manajer dalam mencapai tujuan

organisasi. Dengan memahami konsep ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi dan masyarakat dan Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi seta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).

### **2.1.2 Laporan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan keuangan OPD merupakan hasil identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah. Laporan tersebut merupakan asersi pihak manajemen pemerintah yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan pada

pemerintah daerah (Arfianti, 2011) dan Laporan tersebut digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Erlina dkk, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan tersebut terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Kementerian/lembaga di lingkungan pemerintah pusat

Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi di pemerintah selama satu periode akuntansi. Laporan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan berisi informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan serta bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan juga berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensipemerinta untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Berdasarkan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi di pemerintah selama satu periode. Laporan ini disusun dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah dan berisi informasi keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.

#### **2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Komponen yang disajikan dalam laporan keuangan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa

kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual dimana pengakuan didasarkan pada munculnya hak dan kewajiban, bukan hanya berdasarkan arus kas.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial.

#### A. Laporan Pelaksanaan Anggaran

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara negara/bendahara umum daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 63 dijelaskan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## B. Pelaporan Finansial

### 1. Neraca

PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca mencakup unsur-unsur, berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/ dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terbagi menjadi dua kelompok, aset lancar dan aset tidak lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila aset tersebut dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, persediaan, dan piutang. Aset tidak lancar mencakup aset yang tidak dapat untuk segera direalisasikan dan bersifat jangka panjang, aset tidak lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yaitu utang yang dibayarkan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang yaitu utang yang dibayar dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 2. Laporan Operasional (LO)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang terdapat dalam laporan operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/atau oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

### C. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dengan ekuitas pada tahun sebelumnya. laporan perubahan ekuitas berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyajikan sekurang- kurangnya:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- d. Ekuitas akhir.

#### D. Laporan Arus Kas

PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang terdapat dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut;

- a. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/ daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.

#### E. Catatan Atas Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

### **2.1.2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengungkapan informasi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik di tingkat daerah. Kualitas laporan keuangan daerah sangatlah vital, karena laporan tersebut menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, termasuk masyarakat, investor, pihak terkait, dan pemerintah pusat.

Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan tingkat transparansi, akurasi, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus mencakup informasi yang lengkap, relevan, dan dapat dipercaya. Informasi tersebut haruslah mudah dipahami oleh pengguna laporan, baik mereka yang memiliki latar belakang keuangan maupun yang tidak. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kualitas laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan keuangan yang akurat dan jelas akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan dan digunakan dengan baik.

Menurut PP No.71/2010 pengertian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib untuk menyajikan laporan keuangan.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas (Adhi & Suhardjo, 2013). Oleh karena itu, agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif (Yuliani dkk, 2010).

### **2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Hasil kajian penelitian tentang penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting untuk mewujudkan tujuan dalam sebuah organisasi. Kompetensi sumber daya pegawai penatausaha keuangan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan akuntansi akan memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan.

Menurut Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kade Sinarwati (2015) apabila Kompetensi sumber daya manusia baik maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan baik sehingga memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

## 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai pedoman sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Vicky Agustiawan Lasoma (2013) semakin baik dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

## 3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi yang disajikan membutuhkan suatu sistem dalam penyusunannya. Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah adalah prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Menurut Angga Dwi Permadi (2013) semakin baik dalam menerapkan sistem Informasi akuntansi maka kualitas laporan keuangan juga semakin baik.

### **2.1.2.4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan kriteria/persyaratan laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI adalah sebagai berikut:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.

Informasi yang relevan mencakup:

##### a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi eskpektasi mereka dimasa lalu.

##### b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

##### d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan

kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

### a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh

### c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik sudah semestinya menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. pemerintah daerah dituntut untuk memiliki suatu sistem informasi akuntansi yang handal agar mampu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah adalah suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan keuangan dari awal hingga akhir, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada

rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

### **2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi adalah kumpulan sumber daya manusia yang secara dinamis menunjukkan kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas seseorang. Kompetensi merupakan modal awal yang harus dimiliki seorang pegawai untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Wibowo (2016) menambahkan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang berlandaskan pada keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan Sudarmanto (2015) dalam bukunya merangkum beberapa definisi kompetensi oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Richard E. Boyatzis (1982), kompetensi merupakan karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja unggul dan/atau efektif didalam pekerjaan
2. Klemp (1980), kompetensi adalah karakteristik mendasar seseorang yang menghasilkan kinerja unggul dan/atau efektif dalam suatu pekerjaan (dalam Robert Wood dan Tim Payne, 1998)
3. Likewise Hornby dan Thomas (1989), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan kualitas manajer atau pemimpin yang efektif (dalam Woodruffe, 1993)
4. Lyle Spencer & Signe Spencer (1993), kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan/atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi

5. Michael Armstrong (1994), kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda-beda. Kompetensi menentukan aspek-aspek proses kinerja pekerjaan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut maka setidaknya dapat diambil sebuah konsep mengenai kompetensi adalah karakteristik-karakteristik yang ada pada diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang yang mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang yaitu keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, karakteristik kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual dan budaya organisasi (Spencer, 2003) Dalam suatu entitas terutama entitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa lepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi.

Membahas kompetensi sumber daya manusia berarti membahas karakteristik sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang berkualitas yang dapat menyokong operasional kerja dan pertumbuhan organisasi. Perkembangan kompetensi yang semakin luas dari sumber daya manusia memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kesuksesan organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya kegiatan operasional suatu entitas tak terkecuali pemerintah baik pusat maupun daerah, selain ketersediaan sarana maupun prasarannya. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia

(aparatur daerah) yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sehingga agar terdapat manusia- manusia/aparatur-aparatur daerah yang berkualitas atau yang berdaya guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (Oktarina dkk, 2016).

Manajemen sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut dengan aparatur daerah merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam mengatur orang-orang yang ada dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, guna tercipta sumber daya manusia/aparatur pemerintah daerah yang kompeten dalam bidang tertentu pada lingkup pemerintahan daerah.

Menurut Kesuma, Anwar, & Darmansyah (2017) kompetensi aparatur pemerintah dalam suatu organisasi tentu akan dibuat pembagian kerja, sehingga organisasi tersebut bisa berjalan efektif dan efisien. Pembagian tersebut tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dianggap akan mempermudah pekerjaan tersebut. Salah satunya yaitu pertimbangan aparatur daerah yang ditempatkan harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan di awal. Pemerintah daerah sangat membutuhkan aparatur daerah yang memiliki wawasan luas, profesionalitas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif.

Kompetensi aparatur daerah mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran/outputs dan hasil- hasil/outcomes (Triwardana, 2017). Dalam hal

pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah melalui SKPD-SKPD nya harus memiliki aparatur daerah yang memiliki kapasitas dibidang akuntansi yang tentunya didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, serta mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut ditujukan supaya dalam penerapan sistem Informasi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), aparatur daerah yang memiliki kapasitas atau bisa dikatakan berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik serta mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketidcakapan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logikanya dalam bidang akuntansi akan mengakibatkan suatu hal yang fatal yakni kemungkinan besar terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan atau bisa saja informasi keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu menganut adanya prinsip "*the right man on the right place*" sehingga terwujud atmosfer atau kondisi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Adhi & Suhardjo (2013) aparatur pemerintah daerah yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, aparatur pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas aparatur pemerintah daerah dibidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.

### **2.1.3.1 Karakteristik Kompetensi SDM**

Menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2016), ada lima karakteristik utama dari kompetensi yang pada akhirnya memengaruhi kinerja individu pegawai, yaitu:

#### *1. Motive*

Sesuatu dimana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu

#### *2. Trait*

Karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Watak yang membuat orang berperilaku atau bagaimana seseorang merespon suatu dengan cara tertentu

#### *3. Self Concep*

Sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan seseorang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang

#### *4. Knowledge*

Informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks, skor pada tes pengetahuan sering tidak berhasil memprediksi prestasi kerja karena tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keterampilan yang sebenarnya.

#### *5. Skills*

Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

### **2.1.3.2 Indikator Kompetensi Aparatur Negara**

Menurut Hevesi (2005) Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang terdiri dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan dalam rangka mendukung terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Standar kompetensi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut:

- a. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
- b. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan

tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

- c. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala risikonya.

Sedangkan, Martoyo (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Adapun variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator yaitu:

- a. Pemahaman tentang akuntansi;
- b. Sumber daya manusia yang memadai;
- c. Peran dan tanggung jawab
- d. Keahlian dalam tugas
- e. Sosialisasi peraturan baru
- f. Pemahaman tentang struktur organisasi

#### **2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah**

Sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan atau suatu cara, Suatu sistem melingkupi struktur dan proses, dimana struktur membicarakan elemen- elemen atau unsur yang dapat membentuk sistem itu sendiri, Sedangkan proses membicarakan cara kerja/prosedur dari setiap elemen secara berurutan atau teratur, serta sistematis, Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama agar memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Beberapa bagian dari

sistem mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi tersebut diharapkan informasi yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dari para pemakai informasi.

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2014), Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting information system*) adalah kecerdasan alat penyedia informasi. SIA harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Perangkat lunak komputer merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi. SIA yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi dengan :

- a. Dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa;
- b. Dapat meningkatkan efisiensi;
- c. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya;
- d. Meningkatkan struktur pengendalian internal;
- e. Meningkatkan pengambilan keputusan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan terutama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi sampai menjadi sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sistem Informasi Akuntansi juga mempunyai peranan penting didalam kemajuan dan pengembangan perusahaan untuk dapat mengukur kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Maka dari itu adanya Sistem Informasi Akuntansi kinerja suatu perusahaan menjadi lebih terarah dan dapat menghasilkan perusahaan yang

memiliki stabilitas dan kekuatan yang memadai dan apabila perusahaan telah stabil dan kuat maka laju bisnis perusahaan akan mendapatkan penghasilan yang cukup memadai.

#### **2.1.4.1 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah**

Pramono Hariadi, (2010), menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah serangkaian prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi dengan baik untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, system informasi akuntansi adalah rangkaian prosedur yang melibatkan input berupa transaksi keuangan, proses analisis transaksi yang dicatat dalam catatan atau jurnal, serta output berupa laporan keuangan (Mulyadi, 2001).

Menurut Abdul Halim (2007), akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (seperti kabupaten, kota, atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, investor, kreditur, masyarakat, analis dan pengamat pemda, serta Pemerintah Pusat (Abdul Halim, 2007).

Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, hingga peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Proses tersebut dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari Pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

#### **2.1.4.2 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu.

##### **a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, Nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

d. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi

ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

#### **2.1.4.3 Indikator Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Angga Dwi Permadi (2013), berikut adalah indikator penerapan system Informasi akuntansi keuangan daerah:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan: Sistem Informasi akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini. Standar tersebut didasarkan pada prinsip akrual, di mana transaksi keuangan diakui pada saat terjadinya, baik sebagai hak maupun kewajiban, meskipun belum ada penerimaan atau pengeluaran kas.
- b. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum: Semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan standar pencatatan umum yang berlaku. Setiap transaksi keuangan harus dianalisis secara seksama, disertai dengan bukti transaksi yang relevan. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.
- c. Pembuatan Laporan Keuangan secara Berkala: Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan harus disusun secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan.

### 2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (1994) adalah sebagai berikut: "Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional entitas, keandalan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku." Sedangkan definisi sistem pengendalian internal menurut Mahmudi (2016) adalah sebagai berikut: "Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat *incidental* dan responsif atas kasus tertentu saja, tetapi bersifat terus-menerus."

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki definisi sebagai berikut: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Sistem pengendalian internal pemerintah menurut Permendagri N0. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang

diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah. Sukmaningrum (2012) sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dalam kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

a. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi penggunaan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

#### **2.1.5.1 Unsur Pengendalian Intern Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur, sebagai berikut;

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, sehingga akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakan integritas dan nilai-nilai etis
- b. Komitmen pada kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Peran 42erakan pengawasan internal pemerintah yang efektif
- g. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

## 2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penilaian risiko terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
- b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
- c. Identifikasi risiko
- d. Analisis risiko

## 3. Kegiatan Pengendalian

Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan kompleksitas dari tugas dan fungsi jabatannya. Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik dan asset
- e. Pemisahan fungsi
- f. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- i. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- j. Dokumentasi atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

#### 4. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

## 2.2 Tinjauan Empiris

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian ini, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian lain.

Penelitian yang berhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.**Penelitian Terdahulu

<b>Nama dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Wiwin Setyaningrum. Suci Atiningsih (2019)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di kota salatiga.	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Intern Sistem Akuntansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Keuangan Melaporkan Ke Tingkat Signifikansi < 0,05. Sedangkan Hasil Sumber Daya Manusia Tidak Ada Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Tingkat Signifikansi > 0,05. Analisis Regresi Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) Sebesar 0,696 Atau 69,6% Yang

		Berarti Bahwa Variabel Bebas Dalam Penelitian Ini Dapat Mempengaruhi Variabel Terikat, Sedangkan Sisanya 30,4% Dijelaskan Oleh Variabel Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Penelitian Ini.
Hartono. Ramdany (2020)	Pengaruh sap, pengendalian intern dan kompetensi sdm terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SDM Secara Parsial Dan Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Harken Drama (2014)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening	Hasil Penelitian Ini Dapat Menggambarkan Bahwa Responden Pada SKPD Kota Solok Sudah Sepenuhnya Menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Membuat Laporan Keuangan. Hasil Penelitian Mengindikasikan Bahwa Penerapan SAKD Berpengaruh Signifikan Positif Dan Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Solok.
Joppie Immanuel Tarigan. Eka Nurmala Sari (2021)	Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada kepolisian daerah Sumatera Utara	Hasil Penelitian Menyimpulkan Bahwa Sistem Informasi Akuntansi Maupun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Namun Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lingkungan Polda Sumatera Utara
Kartika Dwi Indrayani. Harjanti Widiastuti (2020)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel	Penelitian Ini Menemukan Bahwa Penerapan SAKD Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Dan SPI Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian Ini Juga Menemukan Bahwa Kompetensi Sumberdaya Manusia Memiliki Peran Penting

	moderasi (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten klaten)	Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Hal Ini Ditunjukkan Dengan Adanya Pengaruh Positif Penerapan SAKD Dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Ketika SDM Yang Terkait Dengan Penyusunan Laporan Keuangan Memiliki Kompetensi Yang Baik. Hal Ini Mengindikasikan Bahwa Keberhasilan Sistem Sangat Bergantung Pada Manusia-Manusia Yang Menjalankan Sistem Tersebut
Aditya Sanjaya (2017)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi (studi pada skpd kabupaten 45eraka)	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Adalah Pengaruh Signifikan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Signifikansi < 0,05. Sedangkan Hasil Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Keuangan Melaporkan Tingkat Signifikansi > 0,05. Koefisien Analisis Regresi Dari Penentuan (R <sup>2</sup> ) Sebesar 0,976 Atau 97,6% Yang Berarti Variabel Bebas Dalam Penelitian Ini Dapat Mempengaruhi Variabel Terikat, Sedangkan Sisanya 2,4% Dijelaskan Oleh Variabel Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Penelitian Ini.
Ivan Budi Saputra Agustiawan (2020)	Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten kebumen	Hasil Analisis Menunjukkan Bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan

		Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Neneng Sri Suprihatin, Arinda Ayu Ananthi (2019)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil Penelitian Menunjukkan Terdapat Pengaruh Positif Dan Signifikan Antara Variabel Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Original Sample Estimate Sebesar 0.421 Dan T-Statistik Sebesar 3,567 (Lebih Besar Dari T-Tabel, $\pm 2,750$ ). Pasangan Hubungan Antara SIA Dengan Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan Pengolahan Data Yang Diperoleh, Memiliki Hubungan Yang Positif Dan Signifikan Yang Ditunjukkan Dengan Nilai Original Sample Estimate Sebesar 0.644 Dan T-Statistik Sebesar 6,315 (Lebih Besar Dari T-Tabel, $\pm 2,750$ ).
Dhedy Triwardana (2017)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan skpd (studi pada pemerintah daerah kabupaten 46eraka)	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Dengan Signifikansi 0,003, Penerapan Sistem Keuangan Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Dengan Signifikansi 0,000 Dan Kompetensi Manusia Sumber Daya Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Sebesar 0,000 Makna. Hasil Penelitian Ini Juga Menunjukkan Bahwa Koefisien R Square Adalah 94,1%. Masing-Masing Variabel Independen, Memberikan Pengaruh Yang Kuat Terhadap Dependen Variabel, Artinya Variabel Independen Dapat Menjelaskan Variabel Dependen Dengan Baik. Sedangkan Sisanya Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Yang Tidak Termasuk Dalam

		Regresi Model Tidak Dimasukkan Dalam Penelitian Ini. Semua Variabel Juga Memiliki Hubungan Yang Kuat Dengan Variabel Dependen Dalam Penelitian Ini.
Abdul Aziz Ramadhani (2018)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi staf terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sedangkan Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Staf Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Sanusi Ariyanto (2020)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten pelalawan tahun 2018	Hasil Penelitian Menunjukkan: (1) Penerapan SAP Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2017. Hal Ini Membuktikan Bahwa Semakin Baik Tingkat Penerapan SAP Yang Dilakukan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, Maka Akan Berdampak Positif Pada Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan; (2) Kompetensi SDM Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017. Semakin Tinggi Kompetensi SDM Yang Dimiliki Seperti Tingkat Pengetahuan, Keterampilan Dan Sikap Perilaku Dalam Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Maka Kualitas Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Cenderung Semakin Baik
Rezky Mulya Anugriani, Jeni Kamase, Syamsu Alam (2020)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan pada	Hasil Penelitian Menyimpulkan Bahwa (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Mempunyai Pengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

	badan keuangan daerah kota parepare	Daerah. (2) Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, (3) Kompetensi Memiliki Hubungan Positif Namun Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah, Dan (4) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Memiliki Pengaruh Secara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dibutuhkan Dalam Menyusun Laporan Keuangan Daerah, Namun Sangat Disayangkan Jumlah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Badan Pengelola Keuangan Kota Parepare Belum Sesuai Dengan Kebutuhan
Indri Apri Mayanti (2022)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	.Hasil Penelitian Menunjukkan Terdapat Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil Pengujian Hipotesis Pertama Ini Dibuktikan Dengan Nilai Signifikansi T Sebesar $0,000 < 0,05$ Dan Sebesar $7,355 > 1,665$ . Setelah Itu, Terdapat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil Pengujian Hipotesis Kedua Ini Dibuktikan Dengan Nilai Signifikansi T Sebesar $0,002 < 0,05$ dan Sebesar $3,164 > 1,665$ . Selain Itu, Terdapat Pengaruh Secara Simultan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga Ini

		Dibuktikan Dengan Nilai Nilai Signifikansi F Sebesar $0,000 < 0,05$ Dan Sebesar $71,470 > 3,12$ .
Nisfatul Hasanah (2020)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada 49erakan pramuka kwartir cabang cianjur)	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Parsial Dan Simultan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara Parsial, Besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sebesar 0,447 Dan Tingkat Signifikansi Pada 0,002 Dan Besarnya Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sebesar 0,574 Dan Tingkat Signifikansi Pada 0,001. Secara Simultan, Besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Menunjukkan Bahwa Nilai F Hitung Sebesar 24,931 Dan Signifikansi Pada 0,000. Sedangkan Hasil Koefisien Determinasi Menunjukkan Bahwa Besarnya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sebesar 43,8% Dan Sisanya Sebesar 56,2% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Oleh Penulis, Yaitu Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
Mutmainnah (2020)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Berdasarkan Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Menunjukkan Bahwa Semua Item Pernyataan Dalam Kuesioner Dinyatakan Valid Dan

	daerah (studi kasus pemda kabupaten barru)	Reliabel. Hasil Uji T Menunjukkan Bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
--	--	--

Sumber: Tinjauan Literatur, 2023

## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Dari beberapa literatur yang telah dikumpulkan maka penjabaran mengenai hubungan antar variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai dipengaruhi oleh dua hal yaitu kualitas informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya (Wahyono dan Teguh, 2014). Sumber daya manusia yang terlibat dalam menghasilkan informasi keuangan wajib memiliki tingkat keahlian yang memadai dan secara berkelanjutan menjaga tingkat keahliannya agar informasi keuangan tetap terjaga kualitasnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang baik, dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping itu pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Selain itu, dengan hadirnya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan

keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sangat berpengaruh cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten akan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.

## **2. Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Menurut Diani (2014), sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, perlu memperhatikan penyampaian informasi keuangan secara tepat, cepat, dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem informasi yang baik untuk mengelola dan menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa implementasi sistem informasi akuntansi yang baik dalam pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silviana (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena

sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem terintegrasi yang berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah positif dan signifikan. Sistem informasi tersebut memberikan kontribusi yang kuat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta membantu dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan

### **3. Hubungan Pengendalian intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah.**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu sistem yang dirancang dan dijalankan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian intern sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berprinsip tata kelola yang baik. Sistem ini perlu diterapkan di berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi sektor publik, bisnis, dan sosial.

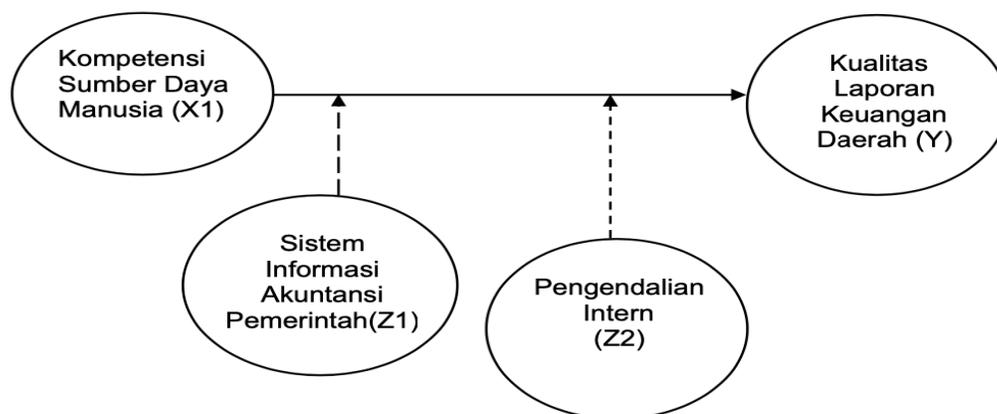
Dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, risiko penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan dapat diminimalisasi. Namun, masih terdapat banyak kasus kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern yang mengakibatkan adanya penyimpangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terungkap melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang diharuskan.

Hasil audit yang dilakukan oleh BPK sering kali menghasilkan opini "tidak wajar" dan/atau "disclaimer" karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Mukadarul (2016) membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), Nurillah (2014), Surastiani dan Handayani (2015), serta Sudiaranti dkk. (2015) yang juga menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian intern oleh pemerintah daerah, maka cenderung semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. 1** Kerangka Konseptual



Sumber: Tinjauan Literatur, 2023

### 3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh secara Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Diduga terdapat pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah dalam memoderasi Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Diduga Pengendalian Intern berpengaruh dalam memoderasi Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah